


TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI

SEMESTER I 2018



Latar Belakang

1. Penindakan kasus korupsi hingga hari ini belum transparan dan akuntabel.
2. Upaya memantau kinerja penegak hukum terkait penanganan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan.



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**



Tujuan

1. Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi
3. Mengetahui pola korupsi khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

METODOLOGI



1. Tabulasi data
2. Olah data
3. Data komparasi
4. Analisis deskriptif

SUMBER DATA



1. Media massa
2. Media online
3. Press release penegak hukum

WAKTU



Waktu pemantauan dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2018 – 30 Juni 2018

Temuan Umum



Kasus Korupsi

139 kasus



Jumlah Tersangka

351 orang



Nilai Kerugian Negara

Rp 1,09 triliun

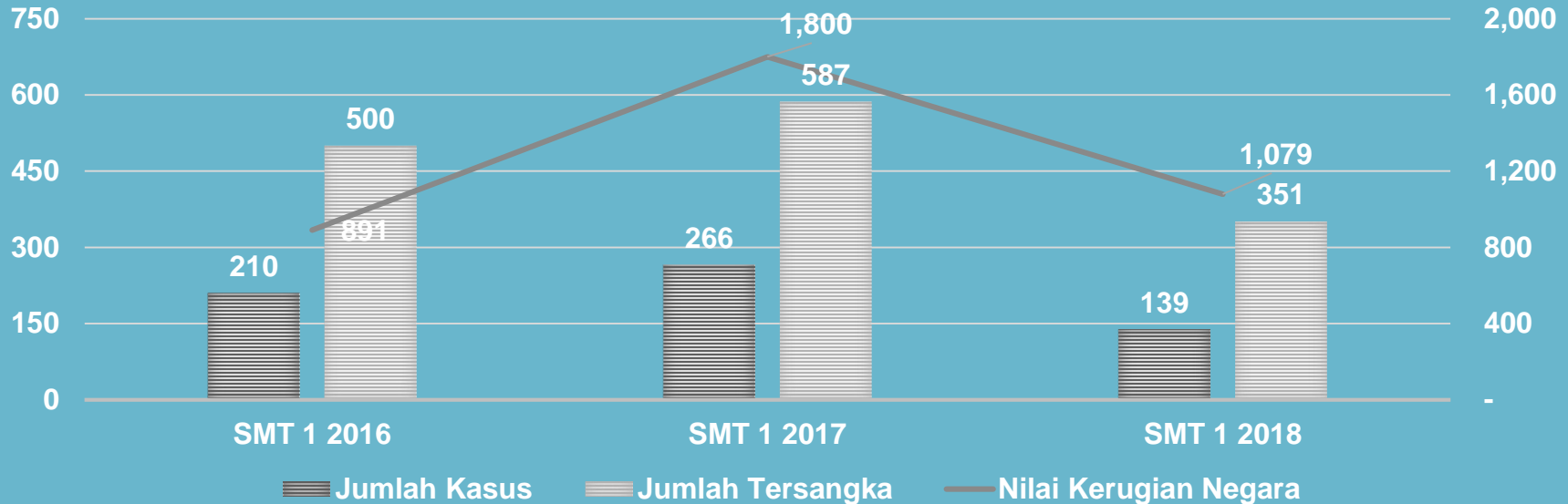


Nilai Suap

Rp 42,1 miliar

Perbandingan Tren Korupsi Per Semester

(Semester I 2016 – Semester 1 2018)



- Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi per kasus pada semester I 2018, yakni Rp 7,8 miliar.
- Hal ini berbeda pada semester I di dua tahun sebelumnya. Pada semester I 2016 rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan per kasus, yakni Rp 4,2 miliar. Sedangkan pada semester I 2017 rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan per kasus adalah Rp 6,7 miliar.
- Apabila dilihat dari tren maka kerugian negara yang timbul per kasus cukup meningkat.

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

1 Penyalahgunaan Anggaran
Kasus korupsi : 39 kasus
Nilai kerugian negara : Rp 86,5 miliar

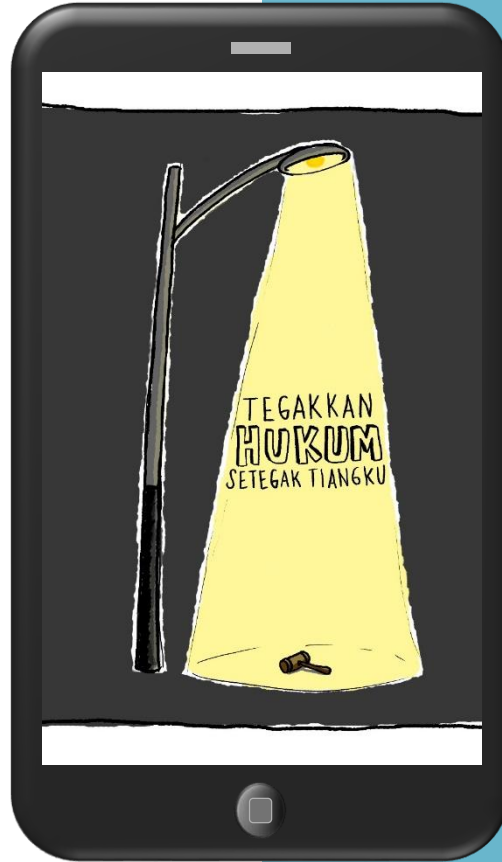
2 Mark Up
Kasus korupsi : 26 kasus
Nilai kerugian negara : Rp 372 miliar

3 Suap
Kasus korupsi : 24 kasus
Nilai Suap : Rp 41,7 miliar

4 Pungutan Liar
Kasus korupsi : 17 kasus
Nilai Pungutan Liar : Rp 32 juta

5 Penggelapan
Kasus korupsi : 11 kasus
Nilai Pungutan Liar : Rp 11,3 miliar

6 Laporan Fiktif
Kasus korupsi : 111 kasus
Nilai kerugian negara : Rp 52,2 miliar



7 Penyalahgunaan Wewenang
Kasus korupsi : 4 kasus
Nilai kerugian negara : Rp 569 miliar

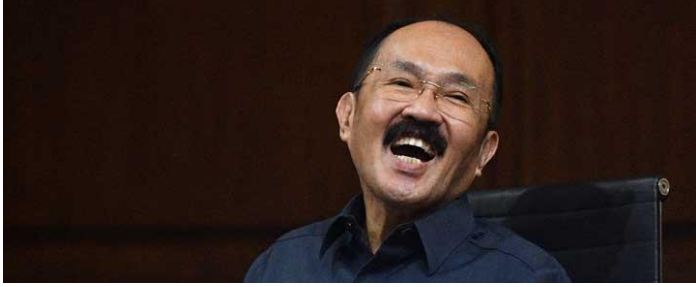
8 Gratifikasi
Kasus korupsi : 2 kasus
Nilai Gratifikasi : Rp 435 juta

9 Penyunatan/Pemotongan
Kasus korupsi : 2 kasus
Nilai Pungutan Liar : Rp 1,4 miliar

10 Anggaran Ganda
Kasus korupsi : 1 kasus
Nilai Pungutan Liar : Rp 1,6 miliar

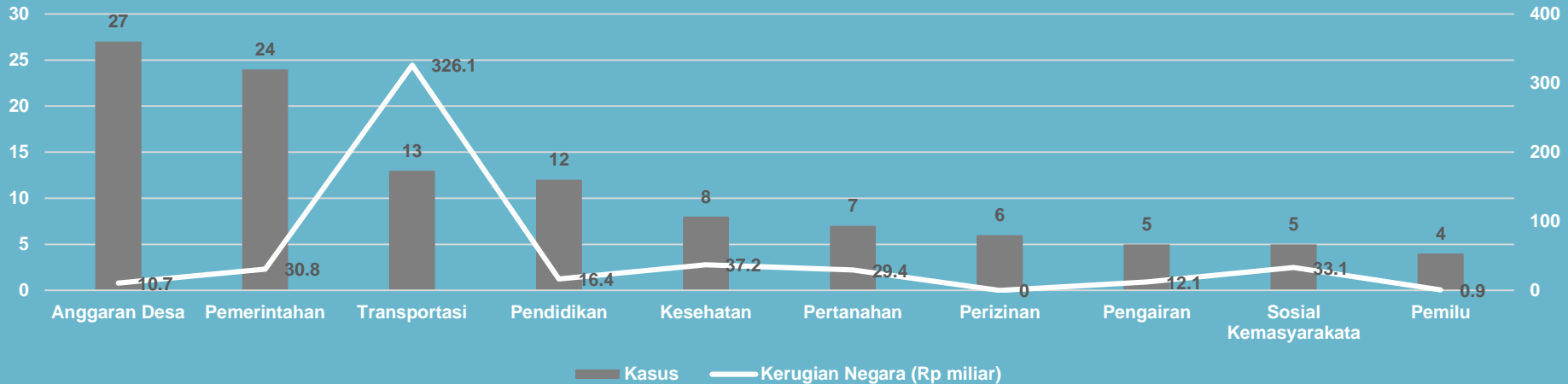
11 Kegiatan/Proyek Fiktif
Kasus korupsi : 1 kasus
Nilai Pungutan Liar : Rp 810 juta

12 Mark Down
Kasus korupsi : 1 kasus
Nilai Pungutan Liar : Rp 1,4 miliar



“Adapun penegak hukum mencoba untuk memperlebar cakupan pengenaan pidana terhadap koruptor. Ada sebanyak 4 (empat) kasus yang dikenakan pidana pencucian uang, dan 1 (satu) kasus dikenakan pidana *Obstruction of Justice.*”

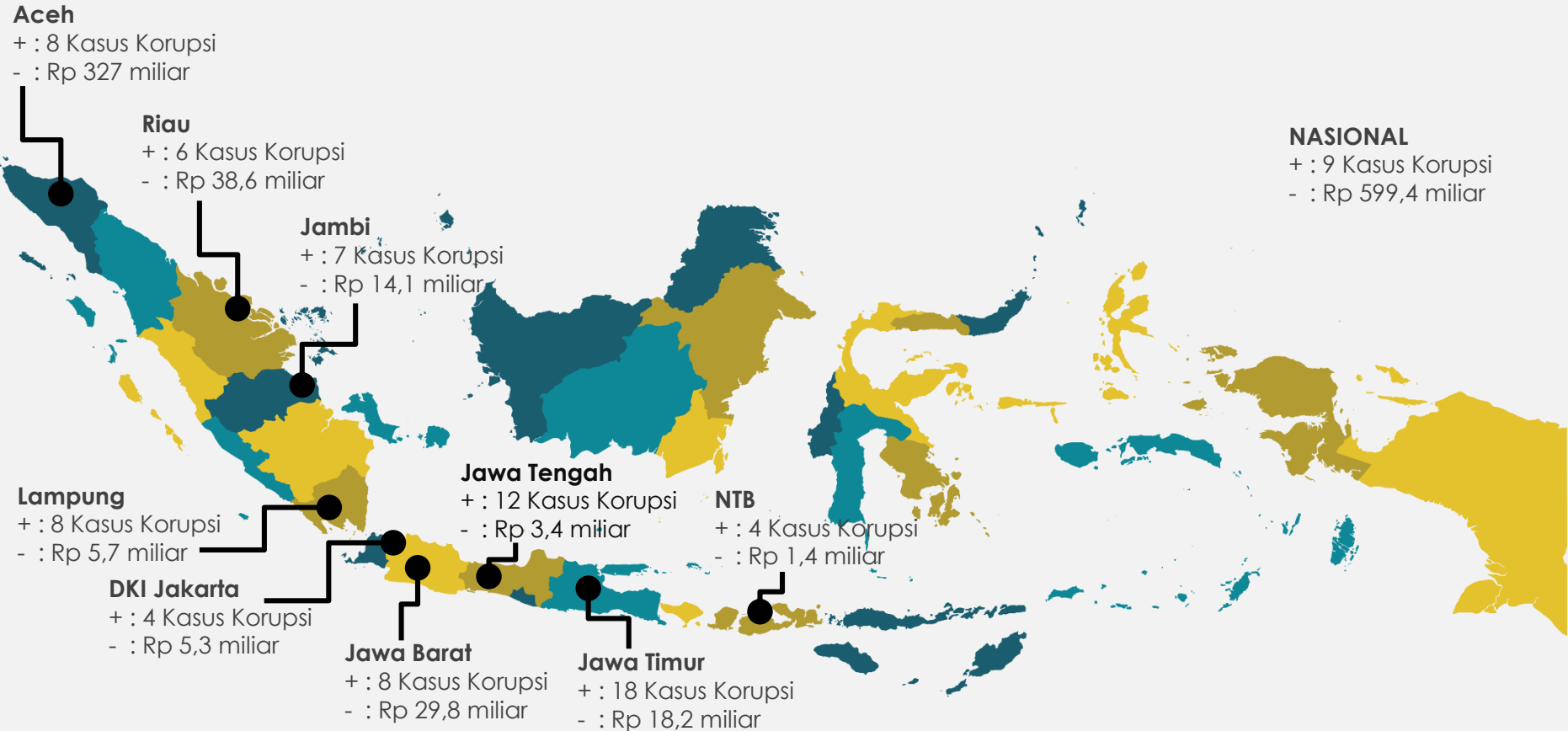
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (10 Terbanyak)



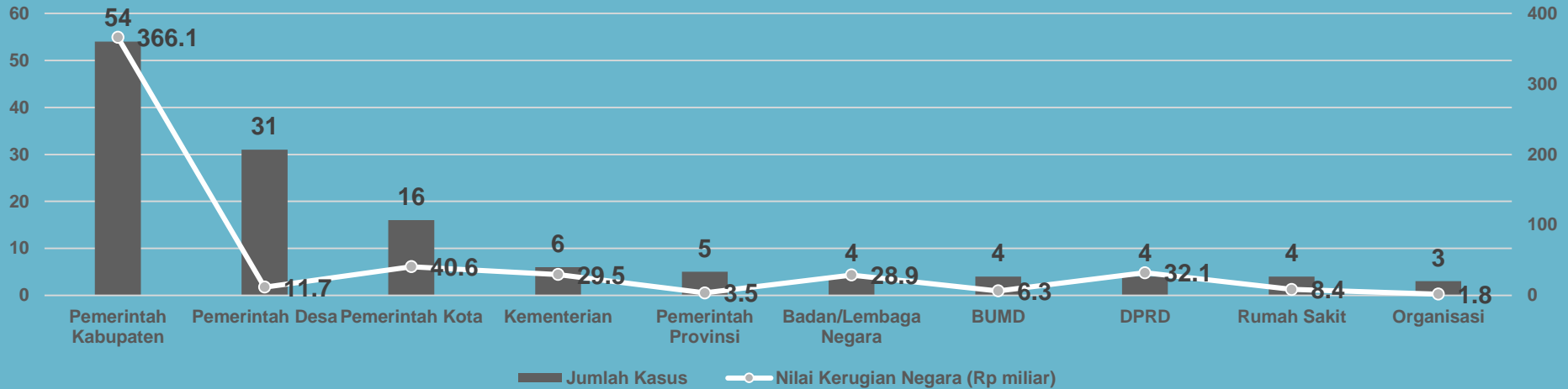
- Pada semester I 2018 anggaran desa menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi.
- Nilai kerugian negara yang paling besar yakni pada sektor transportasi. Sektor transportasi dapat diklasifikasikan menjadi infrastruktur dan non infrastruktur. Infrastruktur berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan (5 kasus), dan pembangunan seperti terminal, pelabuhan, dan bandara (3 kasus). Non infrastruktur berkaitan dengan pengadaan moda transportasi (4 kasus) dan pungutan liar (1 kasus).
- Kasus yang masuk dalam sektor korupsi lebih dominan bermodus suap. Adapun salah satu kasusnya yakni kasus dugaan suap yang melibatkan komisioner KPUD Garut yang disinyalir meloloskan salah satu pasangan calon pada saat Pilkada.

Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Provinsi

(10 Terbanyak)



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Terbanyak)



- Pemerintah tingkat daerah masih menjadi lembaga terbanyak tempat terjadinya korupsi.
- Pemerintah Kabupaten adalah lembaga yang paling banyak terjadi kasus korupsi.
- Salah satu kasus yang menelan kerugian negara cukup besar pada lembaga Pemerintah Kabupaten yakni, kasus dugaan korupsi dermaga bongkar Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 313 miliar dan sedang disidik oleh KPK.
- Pemerintah Desa menjadi lembaga yang rawan dikorupsi.

Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor (10 Terbanyak)



ASN
101 orang



Ketua/Anggota DPRD
68 orang



Swasta
61 orang



Kepala Desa
29 orang



Kepala Daerah
22 orang



Pejabat Pengadaan
19 orang



Aparatus Desa
11 orang



Ketua/Anggota
Koperasi
9 orang



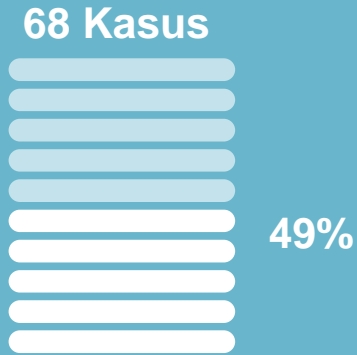
Masyarakat
6 orang



Ketua/Anggota
Kelompok/Organisasi
6 orang

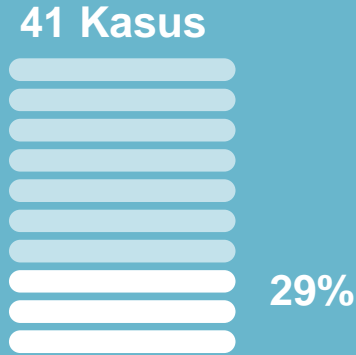
- Aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah ASN.
- Ketua/Anggota DPRD paling banyak terjerat kasus korupsi pada semester I 2018 yakni anggota legislative dari Sumatera Utara.
- Sebanyak 3 (tiga) korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum



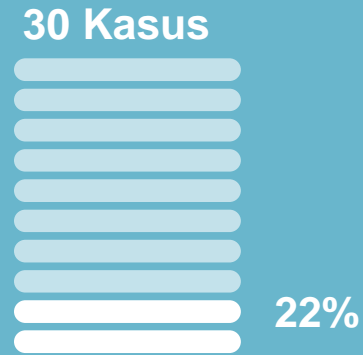
Kejaksaan

Nilai Kerugian Negara
Rp 678 miliar
Nilai Suap
Rp 32 juta



Kepolisian

Nilai Kerugian Negara
Rp 77,2 miliar
Nilai Suap
Rp 200 juta



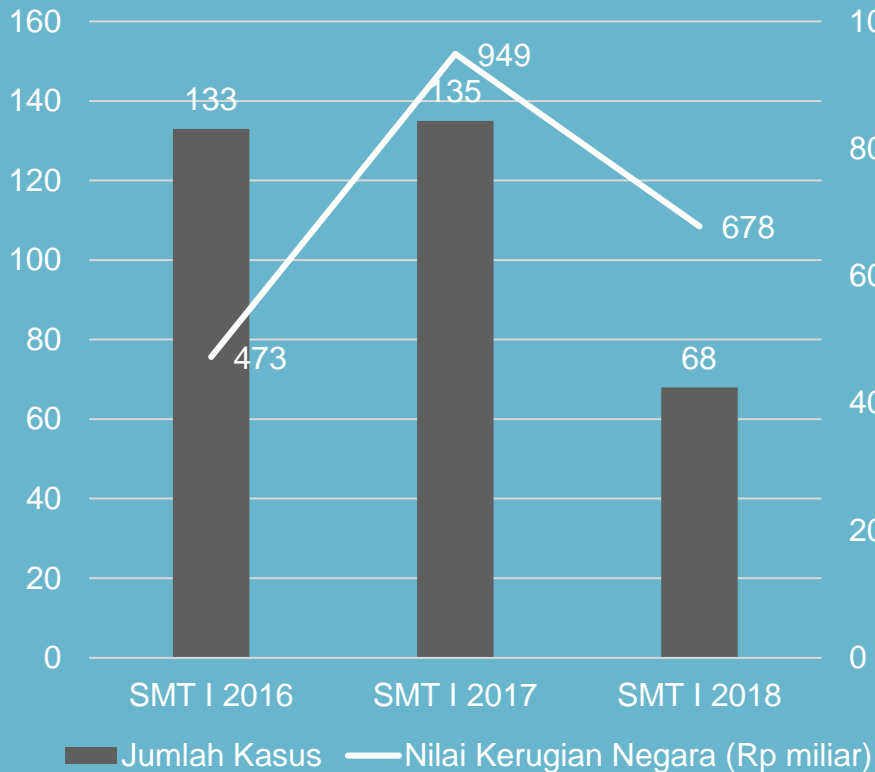
KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK

Nilai Kerugian Negara
Rp 342 miliar
Nilai Suap
Rp 41 miliar

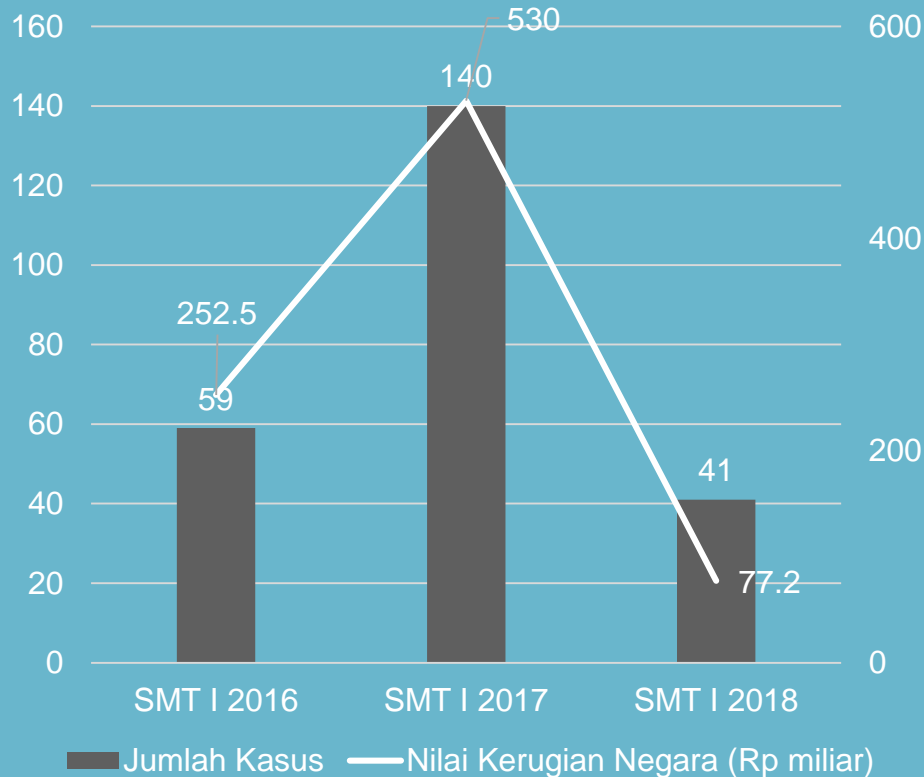
Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi di Kejaksaan



- Penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan menurun apabila dibandingkan antara semester I 2018 dengan tahun sebelumnya pada semester yang sama.
- Total Kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 520 kantor.
- Rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan per bulan yakni 11 kasus. Per kasusnya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 9,9 miliar.
- **Artinya ada sejumlah Kejaksaan di sejumlah daerah yang belum ditemukan adanya penanganan terkait kasus korupsi.**

No	Keterangan	Jumlah Tersangka
1.	ASN	60
2.	Swasta	25
3.	Kepala Desa	16

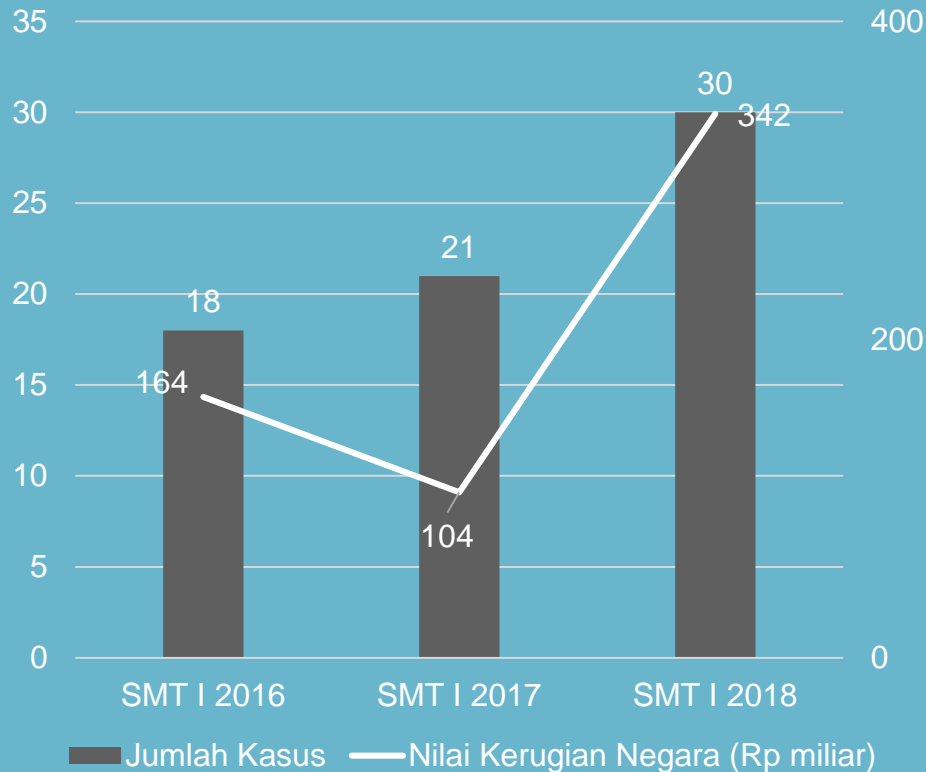
Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi di Kepolisian



- Penanganan kasus korupsi di Kepolisian menurun sangat drastis dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya.
- Sebanyak 535 kantor Kepolisian yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
- Rata-rata kasus yang ditangani oleh Kepolisian per bulan, yakni 7 kasus. Per kasusnya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar.
- **Artinya, berdasarkan pemantuan yang dilakukan terdapat sejumlah Kepolisian yang belum melakukan penindakan terhadap kasus korupsi.**

No	Keterangan	Jumlah Tersangka
1.	ASN	28
2.	Kepala Desa	13
3.	Swasta	12

Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi di KPK



- KPK pada semester I 2018 lebih banyak menangani kasus korupsi dibandingkan dengan semester sebelumnya.
- KPK telah 14 kali melakukan operasi tangkap tangan selama semester I 2018.
- Ada sebanyak 3 (tiga) korporasi yang dijerat oleh KPK terkait dengan kejahatan korupsi, yakni PT Nindya Karya dan PT Buah Sejati terkait kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Dermaga Sabang. Terakhir ada PT Putra Ramadhan yang dijerat pencucian uang berkaitan dengan suap ke Bupati Kebumen.
- Rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK per bulan yakni 5 kasus. Per kasusnya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 11,4 miliar.

No	Keterangan	Jumlah Tersangka
1.	Ketua/Anggota DPRD	62
2.	Swasta	24
3.	Kepala Daerah	20

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sumber Anggaran

**Kerugian Negara
Rp 6,7 miliar
17%, 21 kasus**

**Kerugian Negara
Rp 1,08 triliun
83%, 100 Kasus**

BELANJA

PENERIMAAN

- Korupsi yang paling banyak terjadi pada anggaran belanja.
- Ada 18 kasus korupsi yang tidak berkaitan dengan anggaran belanja maupun penerimaan.
- Kasus korupsi yang tidak berkaitan dengan sumber anggaran yaitu kasus yang bermodus suap.
- Adapun sejumlah kasus yang berkaitan dengan anggaran belanja ataupun penerimaan bermodus suap ialah kasus yang sudah terjadi proses pelaksanaannya.

Pemetaan Korupsi Pada Anggaran Belanja

- Kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa lebih banyak dibandingkan dengan non pengadaan.
- Contoh kasus yang berkaitan dengan non pengadaan yakni mengenai tentang perjalanan dinas fiktif.



PENGADAAN

Jumlah Kasus
74 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 454,3 miliar



NON PENGADAAN

Jumlah Kasus
64 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 622,6 miliar

Pemetaan Korupsi Terhadap Pengadaan Berdasarkan Proses

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	Perencanaan	21	44
2.	Persiapan	8	24
3.	Pemilihan Penyedia	6	16
4.	Pelaksanaan	39	90
TOTAL		74	174

- Celah korupsi yang paling banyak terjadi dalam PBJ ialah pada saat proses pelaksanaan proyek.
- Proses perencanaan menjadi titik rawan dalam PBJ. Sebab proses perencanaan masih dalam seputar pembahasan.
- **Pada proses perencanaan modus yang sering dilakukan yakni penyuapan (10 kasus).**
- **Pada proses persiapan modus yang sering dilakukan yakni mark up (3 kasus).**
- **Dalam proses pelaksanaan modus yang sering dilakukan adalah penyalahgunaan anggaran (16 kasus).**

Pemetaan Korupsi Terhadap Pengadaan Berdasarkan Metode

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	Lelang online	31	85
2.	Lelang (Belum ditemukan di LPSE)	12	28
3.	Penunjukkan langsung	5	13
4.	Swakelola	16	10
5.	Penyedia	4	27
6.	Tidak ada informasi	6	11
TOTAL		74	174

- Modus yang terjadi pada metode penyedia yaitu mark up (3 kasus).
- Modus yang terjadi pada metode swakelola adalah penyalahgunaan anggaran (8 kasus).

- Metode yang paling banyak terjadi korupsi adalah pada saat lelang online.
- Metode swakelola dan penyedia adalah metode yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pengadaan.
- Swakelola menjadi metode kedua yang paling banyak terjadinya korupsi.
- **Modus yang terjadi pada saat lelang online ada dua, yakni mark up (12 kasus) dan suap (12 kasus).**
- **Modus yang terjadi pada metode lelang (belum ditemukan di LPSE), yakni laporan fiktif dan penyalahgunaan anggaran (4 kasus).**
- Dalam metode penunjukkan langsung modus yang terjadi adalah mark up (3 kasus).

Pemetaan Korupsi Terhadap Pengadaan

Crosstabs Proses dan Pengadaan

KETERANGAN		PROSES PENGADAAN				TOTAL
		Perencanaan	Persiapan	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan	
METODE PENGADAAN	Lelang online	12	3	4	11	30
	Lelang (belum ditemukan di LPSE)	4	2	2	5	13
	Penunjukkan langsung	2	-	-	3	5
	Swakelola	1	1	-	14	16
	Penyedia	-	1	-	3	4
TOTAL		21	8	6	39	74

- Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, perencanaan yang dilakukan secara online lebih rawan terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian, lelang online pun memiliki potensi korupsi pada saat pelaksanaan. Namun sampai saat ini lelang online masih menjadi keunggulan bagi masyarakat agar dapat memantau setiap pengadaan yang dilakukan.

Kesimpulan

- Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum pada semester I 2018 menurun, terutama pada Kejaksaan dan Kepolisian.
- Ditemukan adanya penegak hukum di sejumlah Provinsi yang tidak melakukan penindakan terhadap kasus korupsi.
- Anggaran desa menjadi salah satu sektor yang paling rawan dikorupsi. Hal ini perlu diantisipasi mengingat besarnya anggaran dana desa yang akan digelontorkan dari Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) paling banyak terjadi tindak pidana korupsi. Bukan hanya lembaga eksekutifnya saja, lembaga legislatifnya pun banyak yang terlibat kasus korupsi.
- Korupsi banyak terjadi pada anggaran belanja, khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
- Korupsi telah terjadi pada saat proses perencanaan khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa.
- Masih terdapat celah untuk menyiasati system lelang online.



Terima Kasih

